



SALINAN  
MPL

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 03/HK.03.1/5308/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi diinternal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.014-Kpt 05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan-Undangan/deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas
  - g. Tim Pengawasan; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

Kedua ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Ende  
pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum  
SEKRETARIAT  
  
RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE  
 NOMOR : /HK.03.1 /5308/2022  
 TANGGAL : Februari 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Adolorata M. Da Lopez Bi, S. Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fransiska Dollo Naga, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fransiskus Lothar Piara, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Izmir Rizaldi, S. Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Maria Rosita De So, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Ende	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN...

I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ade Irma, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Ende;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
2.	Nurkasih Abubekar, SE	Staf	Anggota	
3.	Josafat I. Rinu	Staf	Anggota	
4.	Matheus A. Lamba	Staf	Anggota	
5.	Yomans Woge	Staf	Anggota	
6.	Mikael Perwirokarso, ST	Staf	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Ende.</li> <li>- Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.</li> </ul>
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	

IV. TIM...

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
2.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Anggota	
3.	Ade Irma, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
4.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Anggota	
5.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
6.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>-Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>-Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu;</li> <li>-Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	

VI. TIM...

VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; Menyusun indikator kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Ende.
2.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Anggota	
3.	Fidelis Tegu	Staf	Anggota	
4.	Aloysius W. Suban Liwu	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Ende; Meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .
2.	Evaristus Mbui	Staf	Anggota	
3.	Antonius Pare	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Olimpius Desrin	Staf	Anggota	
3.	Yoseph Albertus Manulemba	Staf	Anggota	
4.	Yoseph E. Pati Penu, SS	Staf	Anggota	
5.	Maria Angelina Ndungga, SE	Staf	Anggota	

IX. TIM...

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Hildegardis Timu, S. Kom	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi .
3.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Yohana Apaut, S.Sos, M.I.Pol	Kasubag Teknis	Anggota	
5.	Ade Irma, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE  
 NOMOR : /HK.03.1/5308/2022  
 TANGGAL : Februari 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan.	1	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi.		✓											
			2	Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	2	Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi.		✓											
			3	Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas.	3	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali.							✓						



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													Ket	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1	Merumuskan berbagai peraturan perundang undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	1	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan/produk hukum	1	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1	Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2	Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	2	Revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Sistem Pengendalian dan Penyusunan produk hukum satuan kerja	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum satuan kerja		Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	1	Reorganisasi	1	Klasterisasi Sekretariat	1	Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster												sudah terisi sesuai klaster
			2	Alih Status	2	Menurunya jumlah pegawai DPK													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket				
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4	Penataan Tata Laksana	1	Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1	Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan (SAIBA;SAS;SIMONIKA;SIMPONI;SIMAK;SIMAN;SIRUP;SIAP KPU;SAKTI;SMART;E-MONEV;SIDALIH;E-LAPKIN;SIPP;SAPK;SIP-RENJA;SILON;SILOG;SIMPAW;E-PPID;SIPARMAS;SIPOL;SIDAKAM;SIREKAP)	1	Operator mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)														
				2	Pengisian berbagai aplikasi	2	100% (seratus persen) aplikasi terisi dengan baik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2	Implementasi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1	Tersedianya struktur PPID di tingkat satuan kerja	✓													
				2	Pelaksanaan kegiatan PPID	2	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				3	Penyusunan dan Penyampaian Laporan PPID	3	Tersedianya laporan pelaksanaan PPID													✓	
		3	Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU	1	Penerapan sistem arsip	1	Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik												✓		
				2	Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	2	Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah		✓												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													Ket		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU	1	Penyusunan Standar Operasional (SOP)	1	SOP seluruh unit kerja telah tersusun	✓	✓	✓										
			2	Pelaksanaan SOP	2	SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
		5	Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU		Evaluasi pelaksanaan SOP		Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP											✓		
5	Sistem Manajemen SDM	1	Perencanaan kebutuhan	1	Penyusunan peta jabatan	1	Tersedianya peta jabatan			✓										
				2	Pengisian pegawai sesuai dengan petunjuk	2	Tercapainya restrukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota											✓	masih kekurangan 3 PNS	
		2	Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)		Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal		Tercapainya restukturisasi pegawai 35 (tiga puluh lima) pegawai provinsi dan 17 (tujuh belas) pegawai Kabupaten/kota			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		3	Sistem rekrutmen		Sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel (pegawai non PNS)		Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS)				✓									
		4	Sistem promosi secara terbuka		Promosi jabatan terbuka		Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka													
		5	Penilaian kinerja pegawai		Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP		Seluruh PNS menyusun SKP					✓						✓		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													Ket
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6 Reward and punishment berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja	1 Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan									✓					
				2 Tersedianya laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan											✓			
			2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Tersedianya laporan penegakan disiplin														
		7 Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					8 Sistem pengkaderan pegawai ASN	Pelaksanaan kegiatan knowledge sharing bagi peserta diklat dan bimbingan teknis	Laporan kegiatan knowledge sharing di lingkungan satuan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas	1 Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu		✓												
					2 Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu			✓			✓		✓			✓

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3 Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/ bimbingan teknis/ pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat															
7	Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja							✓								
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1. Ditetapkannya keputusan terkait satuan tugas SPIP			✓												
			2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:	2. Terlaksananya kegiatan SPIP.															
			a. menetapkan lingkungan pengendalian;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			b. melakukan penilaian resiko;		✓														
			c. melakukan kegiatan pengendalian;		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
d. melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
e. melakukan pemantauan pengendalian intern.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													Ket
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3 Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat													akan dibentuk pada saat tahapan	
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat														
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat															
8	Pelayanan Publik	1 Penerapan pelayanan satu atap KPU Kabupaten Ende	1 Kebijakan standar pelayanan	1 Tersedianya standar pelayanan	✓	✓	✓											
			2 Penyusunan maklumat pelayanan	2 Tersedianya maklumat pelayanan	✓													
			3 Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan	3 Tersedianya SOP pelayanan	✓	✓	✓											
			4 Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	4 Pelayanan terpadu dalam satu tempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 Pendidikan bagi para pemilih	1 Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2 Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder			✓			✓			✓			✓		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												Ket	
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat														
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan														
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk														
		4 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan dimasing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/tidak memuaskan														✓

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE  
 Kasubag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE,  
 ttd.  
 ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI